

Indikator KESEJAHTERAAN RAKYAT Kabupaten Maluku Tengah



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH**
Statistics of Maluku Tengah Regency

<https://malukutengah.bps.go.id>
Maluku Tengah
2017

Indikator KESEJAHTERAAN RAKYAT Kabupaten Maluku Tengah

<https://malukutengahkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH**
Statistics of Maluku Tengah Regency

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017

ISSN	:	-
No. Publikasi	:	81030.1723
Katalog BPS	:	4102004.8103
Ukuran Buku	:	22 x 16 cm
Jumlah Halaman	:	viii + 77 halaman
Naskah	:	BPS Kabupaten Maluku Tengah
Gambar	:	BPS Kabupaten Maluku Tengah
Diterbitkan Oleh	:	BPS Kabupaten Maluku Tengah
Dicetak Oleh	:	-

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



KATA PENGANTAR

Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal tersebut tercermin dalam setiap anggaran pembangunan yang selalu memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan akselerasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun untuk mewujudkan harapan tersebut bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah, upaya tersebut harus ditunjang oleh data-data yang cukup *up to date* dan akurat.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 merupakan kumpulan informasi yang dapat mengidentifikasi sejauh mana perkembangan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk yang lebih sederhana dan lengkap untuk melihat sejauh mana dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kesejahteraan. Disamping itu dapat pula dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga program yang akan datang dapat lebih baik dan tepat sasaran.

Dengan diterbitkannya Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih untuk semua pihak sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga penerbitan buku ini dapat bermanfaat.

**Kepala BPS Kabupaten
Maluku Tengah**



Paulus M Peilouw, SE
NIP. 19640926 199401 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
Pendahuluan	1
1. Kependudukan	11
2. Kesehatan	25
3. Pendidikan	35
4. Ketenagakerjaan	45
5. Taraf dan Pola Konsumsi	57
6. Perumahan	67



DAFTAR TABEL

<i>No.</i>	<i>Judul</i>	<i>Hal.</i>
Tabel 1.1	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000–2016	13
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	15
Tabel 1.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan Tahun 2012-2016	18
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Perempuan 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2016	20
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Perempuan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Tahun 2012-2016	22
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016	26
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Pengobatan Tahun 2013-2016	28
Tabel 2.3	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Pertama dan Terakhir Tahun 2013-2016	30
Tabel 2.4	Persentase Baduta Umur 0-2 Tahun Yang Pernah Disusui Menurut Lama Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin Tahun 2016	31

Tabel 3.1	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2016	39
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016	41
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2016	42
Tabel 4.1	Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2015	47
Tabel 4.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2015	52
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2013	53
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan dan Persentase Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2016	60
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013-2016	61
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016	63
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap yang Digunakan Tahun 2013-2016	71
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber penerangan yang Digunakan Tahun 2013-2016	73
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan Tahun 2016	74

Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum yang Digunakan Tahun 2016	75
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2016	76
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar Tahun 2016	76

DAFTAR GAMBAR

<i>No.</i>	<i>Judul</i>	<i>Hal</i>
Gambar 1.1	Komposisi Penduduk Tahun 2016	14
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010-2016	17
Gambar 2.1	Persentase Penduduk Menurut Cara Pengobatan Tahun 2012-2016	27
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2016	29
Gambar 3.1	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2016	38
Gambar 4.1	TPAK, TPT dan TKK Tahun 2015	49
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2016	59
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Yang Digunakan Tahun 2016	69
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tahun 2016	70
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding yang Digunakan Tahun 2016	72

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi secara berkesinambungan. Data yang dihasilkan BPS berasal dari berbagai kegiatan sensus dan survei, khusus data sosial dikumpulkan antara lain melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans). Susenas merupakan satu-satunya survei rumah tangga yang mempunyai cakupan data sosial paling luas dan dilaksanakan rutin setiap tahun sejak tahun 1992.

Orientasi pembangunan saat ini adalah peningkatan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan derajat kesehatan, perbaikan tingkat pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, pemenuhan kenutuhan masyarakat dan banyak lagi lainnya, dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model pembangunan seperti ini lebih mencerminkan azas pemerataan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pada pembangunan manusia dari berbagai aspek dianggap merupakan suatu solusi yang cukup tepat. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan meningkatnya hidup masyarakat secara langsung

akan berimplikasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tengah.

Memasuki era otonomi daerah dimana porsi daerah dalam menerapkan implikasi kebijakan lebih luas lagi, sehingga pada proses pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah lebih leluasa untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dengan demikian, kualitas pembangunan di daerah semakin baik, kesempatan untuk mengembangkan diripun semakin terbuka.

Untuk dapat mengetahui perkembangan pembangunan pada saat ini akan dibahas beberapa indikator sosial yang sering dijadikan acuan baik dalam melakukan evaluasi maupun menyusun berbagai kebijakan. Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi serta perumahan.

Karena begitu luasnya dimensi kesejahteraan rakyat yang tidak semuanya dapat diukur secara kuantitas dan terbatas pula data yang tersedia, maka sudah tentu tidak mudah pula untuk memberikan gambaran yang rinci dan lengkap.

2. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah 2017, secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa masalah penting, antara lain:

- 1) Kependudukan



- 2) Kesehatan
- 3) Pendidikan
- 4) Ketenagakerjaan
- 5) Taraf dan Pola Konsumsi
- 6) Perumahan

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan publikasi ini adalah untuk menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah serta perubahan-perubahan sosial lainnya yang telah terjadi sekaligus memantau/menilai hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain itu, Indikator Kesejahteraan Rakyat juga dapat menunjukkan gejala dari beberapa peristiwa sosial yang akan terjadi di masa yang akan datang.

4. Sumber Data

Penerbitan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah 2017 merupakan rangkaian data dasar (data primer), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei-survei lain yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan publikasi ini.



5. Konsep dan Defenisi

A. Kependudukan

- 1) Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- 2) Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk tiap kilometer persegi (Km²).
- 3) Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun.
- 5) Penduduk usia belum produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.
- 6) Penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas.
- 7) Anga beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia belum/tidak produktif dengan penduduk usia produktif dikalikan seratus.

B. Kesehatan

- 1) Sakit adalah keadaan seseorang akibat menderita penyakit menahun (kronis) atau mempunyai keluhan/gangguan kesehatan lain yang menyebabkan kegiatannya terganggu.
- 2) Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis.

C. Pendidikan

- 1) Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin.
- 2) Tamat sekolah adalah yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu jenjang pendidikan sampai akhir dengan mendapat tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi ia mengikuti ujian akhir dan lulus maka dianggap tamat sekolah.
- 3) Masih bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

D. Ketenagakerjaan

- 1) Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.



- 2) Bekerja adalah melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam dalam seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- 3) Angkatan Kerja adalah penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara penduduk angkatan kerja terhadap penduduk 10 tahun ke atas.
- 5) Tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara penduduk 10 tahun yang bekerja terhadap angkatan kerja.
- 6) Pengangguran terbuka adalah penduduk yang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

E. Taraf dan Pola Konsumsi

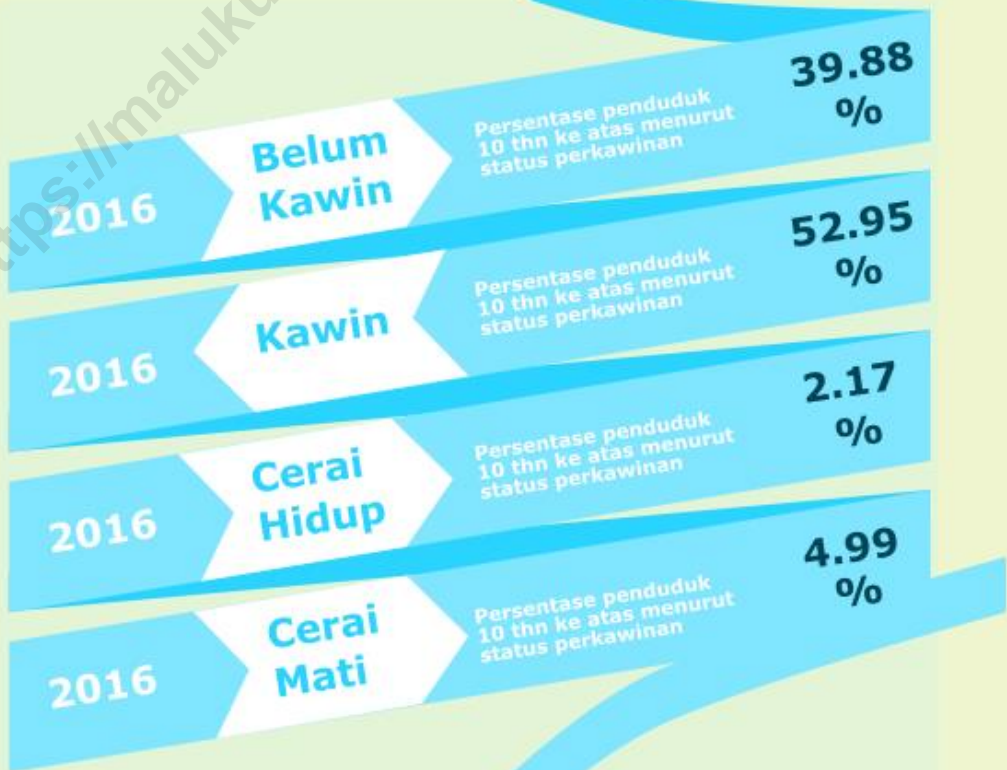
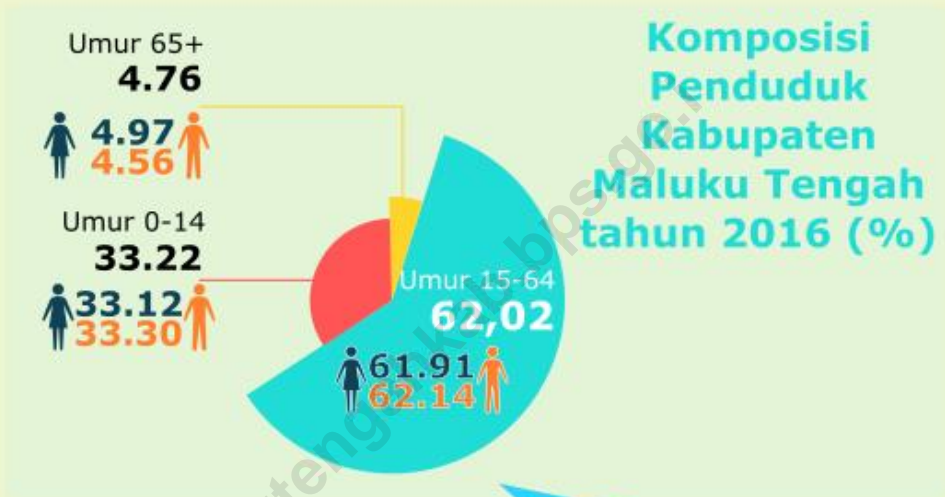
- 1) Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan lain sebagainya.

F. Perumahan

- 1) Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak dan jemuran.
- 2) Atap rumah adalah penutup bagian atas suatu bangunan, sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- 3) Dinding rumah adalah batas penyekat dengan rumah tangga atau bangunan pihak lain atau sisi luar batas dari suatu bangunan.
- 4) Sumber penerangan rumah tangga adalah penerangan utama yang digunakan dalam ruangan tempat tinggal sehingga dapat melakukan kegiatan.
- 5) Fasilitas air minum yang dimiliki adalah fasilitas air minum yang dimiliki dan digunakan rumah tangga.

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

Penduduk



<https://malukutengahkab.bps.go.id>

PENDUDUK

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu modal dasar apabila memiliki kualitas, namun sebaliknya apabila tidak berkualitas maka jumlah penduduk yang besar tersebut akan menjadi beban berat dalam proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Ada beberapa informasi penting dibidang kependudukan yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan kebijakan. Diantaranya yaitu, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, struktur umur penduduk dan informasi yang berkaitan dengan keluarga berencana.

Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk sendiri dapat dibedakan antara tingkat pertumbuhan alamiah (*natural increase*) dan tingkat pertumbuhan migrasi (*spatial migration*), dan yang dimaksud dengan laju pertumbuhan disini adalah merupakan gabungan keduanya.

Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Maluku. Jumlah penduduk Maluku Tengah pada tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 yaitu sebanyak 317.476 jiwa. Sedangkan pada Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah bertambah menjadi 361.698 jiwa. Sensus Penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali karena itu angka penduduk yang dipakai pada tahun-tahun bukan tahun Sensus Penduduk merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk. Angka penduduk tahun 2016 adalah 370.527 jiwa dan dengan luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah sekitar 11.595,57 kilo meter persegi maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Maluku Tengah adalah sebanyak 32 orang per kilo meter persegi.

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
2010-2016

Tahun	Jumlah	Tingkat Pertumbuhan (%)	Kepadatan penduduk per km²
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2010	361.698	1,31	31
2011	364.911	0,89	31
2012	366.006	0,30	32
2013	367.177	0,32	32
2014	368.290	0,30	32
2015	369.315	0,28	32
2016	370.527	0,33	32

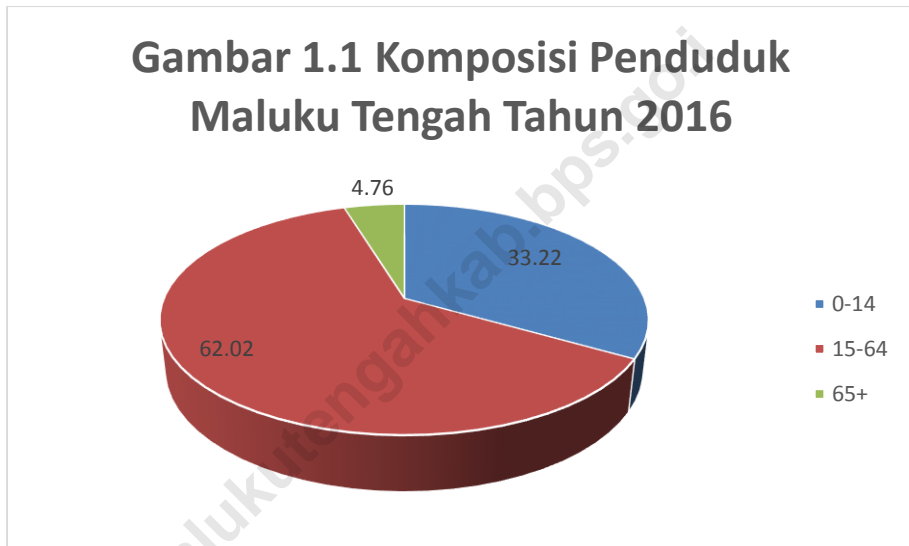
Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengukur seberapa cepat penduduk bertambah setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 adalah 0,33.

Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komposisi yang paling pokok, sebab kedua kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku demografi. Selain itu kedua ciri ini pun mudah dikombinasikan dengan karakteristik sosial, ekonomi maupun geografis. Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata Kabupaten Maluku Tengah masih tergolong struktur umur produktif. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur produktif (15-64

tahun) sebesar 62,02 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 4,76 persen.



Sumber : Susenas

Hal ini memberikan implikasi bahwa kelompok umur produktif perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi pembangunan.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	11,03	8,20	9,63
5-9	11,18	13,33	12,25
10-14	11,09	11,59	11,34
15-19	10,36	8,60	9,49
20-24	7,84	7,51	7,68
25-29	8,34	7,97	8,16
30-34	6,78	7,20	6,99
35-39	6,42	7,18	6,80
40-44	5,45	5,64	5,54
45-49	5,45	6,03	5,74
50-54	4,96	5,37	5,16
55-59	3,50	3,46	3,48
60-64	3,04	2,95	3,00
65+	4,56	4,97	4,76
JUMLAH	100,00	100,00	100,00
Angka Beban Tanggungan Anak			53,56
Angka Beban Tanggungan Usia Lanjut			7,68
Angka Beban Tanggungan			61,24

Sumber : Susenas

Besarnya jumlah penduduk usia muda mengakibatkan beban tanggungan penduduk usia produktif juga semakin besar, Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator pengukur kemajuan ekonomi suatu daerah, Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk

berusia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil jumlah penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif.

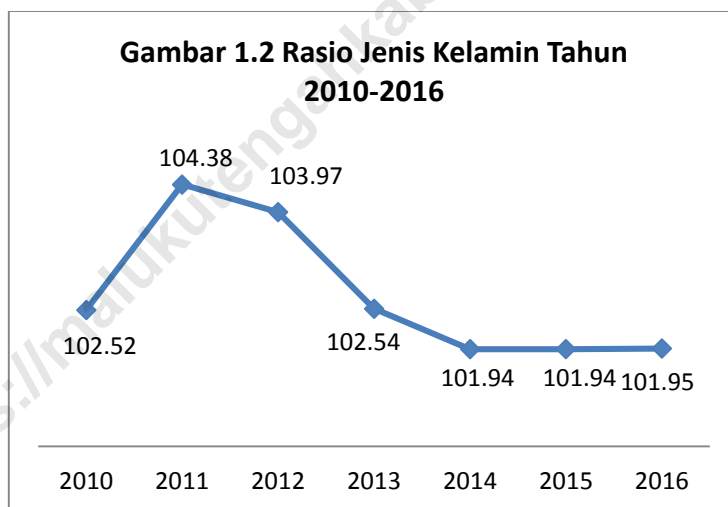
Beban tanggungan anak di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2016 sebesar 53,56 dan beban tanggungan usia lanjut sebesar 7,68. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 54 orang anak dan 8 orang usia lanjut, Dengan kata lain bahwa beban tanggungan di Kabupaten Maluku Tengah masih dikategorikan sedang yaitu mencapai 61,24. Hal ini menunjukam adanya peningkatan yang dicapai dalam pembangunan di bidang kependudukan.

Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah merupakan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Asumsi yang dianut secara luas sehubungan dengan jumlah penduduk adalah biasanya lebih banyak bayi perempuan daripada bayi laki-laki yang dilahirkan pada suatu periode tertentu.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh pola migrasi penduduk suatu daerah, Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maluku Tengah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 102,52 meningkat menjadi 104,38 tahun 2011, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 103,97 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015. Tahun 2016, rasio jenis kelamin mencapai 101,95.



Sumber : Susenas

Secara positif, hal ini dapat dilihat sebagai potensi pemberdayaan laki-laki bagi proses pembangunan. Kaum pria memiliki peran besar dalam sebuah keluarga, sehingga dengan memberdayakan laki-laki maka secara tidak langsung memberdayakan keluarga dan pada akhirnya memberdayakan penduduk secara keseluruhan dalam proses pembangunan.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas
Menurut Status Perkawinan
Tahun 2012-2016

Status Perkawinan Menurut Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
- Belum Kawin	40,74	39,72	41,61	39,38	39,88
- Kawin	53,07	53,44	52,96	53,88	52,95
- Cerai Hidup	0,42	1,92	1,13	1,41	2,17
- Cerai Mati	5,77	4,93	4,29	5,33	4,99

Sumber : Susenas

Bila dilihat menurut status perkawinan, penduduk Kabupaten Maluku Tengah berumur 10 tahun ke atas yang belum kawin mencapai 39,88 persen sedangkan yang kawin sudah mencapai 52,95 persen.

Fertilitas

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh seorang wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama mereka yang dengan

kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan mempunyai pengaruh bagi perkembangan penduduk, karena berpengaruh terhadap fertilitas. Selain itu, umur perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan. Selanjutnya umur perempuan saat perkawinan pertama selain mempengaruhi fertilitas juga mempunyai resiko dalam melahirkan. Semakin muda umur perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental si ibu menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua umur perkawinan pertama (melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Tabel 1.4
Persentase Penduduk Perempuan 10 Tahun Keatas
yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama
Tahun 2016

Umur Perkawinan Pertama	2016
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>
≤ 16	8,78
17 - 18	12,30
19 - 20	20,99
21+	57,94
Jumlah	100,00

Sumber : Susenas

Perempuan berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang perempuan menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak yang lebih banyak.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas dengan usia perkawinan pertama kurang dari 16 tahun di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2016 sebesar 8,78 persen dengan distribusi terbesar pada kelompok umur 21+ tahun sebesar 57,94 persen.

Partisipasi Keluarga Berencana

Upaya untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan dan perkembangan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya diperlukan pengendalian kuantitas penduduk. Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tersebut pemerintah bersama masyarakat selain melakukan upaya penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk juga mengusahakan penurunan angka kelahiran.

Penurunan angka kelahiran ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan upaya pembudayaan Norma Keluarga Kecil bahagia Sejahtera (NKKBS) yang meliputi upaya peningkatan kesadaran dan mendorong pemakaian alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, penundaan anak pertama, pemberian air susu ibu yang optimal dan penjarangan kelahiran.

Keberhasilan dari Gerakan Keluarga Berencana (KB) sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang ada, baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Pendidikan dan tingkat kemampuan ekonomi keluarga adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang datang dari luar peserta KB, yang mempunyai kemungkinan dalam mempengaruhi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Hal ini pula yang akan mempengaruhi para peserta dalam

menentukan jenis alat kontrasepsi yang menurut mereka dianggap paling baik dan aman.

Penduduk perempuan kawin umur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan trend meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 namun menurun di tahun 2014 namun kembali meningkat di Tahun 2015 dan menurun lagi di Tahun 2016. Pada tahun 2016 persentase Perempuan Berstatus Kawin yang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 41,53 persen. Dimana alat kontrasepsi (KB) yang paling banyak digunakan adalah suntikan KB sebesar 61,83 persen.

Tabel 1.5
Persentase Penduduk Perempuan Berstatus Kawin
Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan
Tahun 2012-2016

Alat/Cara KB Yang Digunakan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tubektomi	3,14	1,88	1,52	4,28	1,13
Vasektomi	0,51	0,82	0,06	0,01	0
Susuk KB	2,99	5,76	9,42	16,43	11,97
Suntikan KB	74,50	65,36	65,05	61,48	61,83
Pil	16,04	20,59	18,03	10,54	23,57
Lainnya (termasuk cara tradisonal)	2,81	5,59	5,92	7,27	1,50
Jumlah	100	100	100	100	100
Penduduk perempuan kawin umur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi	44,81	48,29	47,65	49,89	41,53

Sumber : Susenas

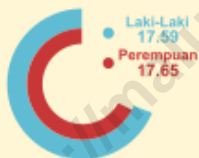


Kesehatan

Angka Kesakitan



Persentase penduduk yang menderita sakit



Persentase perempuan yang mengalami sakit pada tahun 2016 lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu sebesar 17,65 berbanding 17,59.

Cara Pengobatan



Persentase penduduk menurut cara pengobatan



Pada tahun 2016, persentase penduduk sakit yang melakukan berobat jalan meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan yang berobat sendiri yaitu sebesar 44,13%(berobat jalan) dan 31,85%(berobat sendiri). Kondisi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Tempat Berobat



Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat pengobatan.



Berdasarkan data tahun 2016, penduduk Kabupaten Maluku Tengah cenderung banyak yang berobat di Puskesmas dengan persentase sebesar 39,44%. Jika dibandingkan dengan rumah sakit, yang berobat di puskesmas jauh lebih banyak karena puskesmas ada di setiap kecamatan, sedangkan rumah sakit terbatas jumlahnya.

Jaminan Kesehatan



Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.

JAMKESMAS

16.83

BPJS Kesehatan

35.87

Jaminan Kesehatan merupakan hal penting bagi masyarakat yang melakukan rawat inap maupun rawat jalan. Jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah BPJS kesehatan sebanyak 35,87% dan Jamkesmas sebanyak 16,83%.

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

KESEHATAN

Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk, secara fisik khususnya, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Program pembangunan di bidang kesehatan selain bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan, juga bertujuan untuk membentuk anak yang sehat melalui upaya peningkatan status gizi balita dan cakupan imunisasi.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai suatu derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan pada gilirannya akan bermuara kepada meningkatnya kesehatan masyarakat secara umum, sehingga pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan bisa berakselerasi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Maluku Tengah.

Angka Kesakitan

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Dalam bab ini yang bisa ditampilkan sehubungan dengan angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan (sakit) menurut jenis kelamin dan rata-rata lamanya menderita sakit.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit
Dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan	Rata-rata Lama Sakit
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	17,59	7,60
Perempuan	17,65	7,95
Total	17,62	7,77

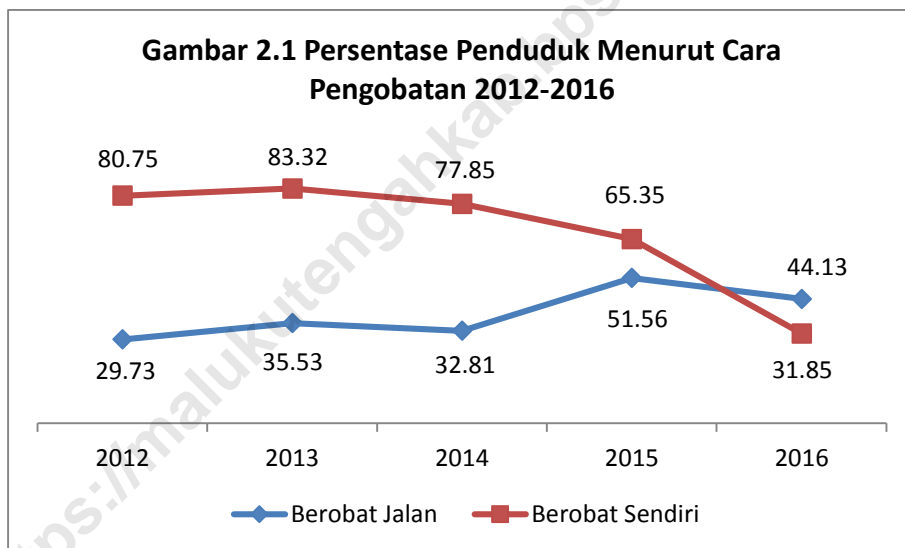
Sumber: Susenas

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya tahun 2016 sebesar 17,62 persen. Bila dilihat dari lamanya sakit, rata-rata perempuan sakit lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.

Cara Pengobatan

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan memiliki dua alternatif pengobatan yaitu dengan mengobati dirinya sendiri atau

melakukan pengobatan ke fasilitas/tenaga kesehatan yang sering disebut berobat jalan. Jika dibandingkan antara berobat sendiri dengan berobat jalan, pada tahun 2016 penduduk yang sakit untuk mengobati sakitnya lebih banyak yang berobat jalan daripada mengobati sendiri yaitu masing-masing sebesar 31,85 persen dan 44,13 persen.



Sumber : Susenas

Puskesmas/Pustu merupakan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk yang berobat jalan (39,44 persen). Sedangkan yang berobat ke Praktek Nakes sebesar 33,08 persen dan berobat ke rumah sakit sebesar 21,34 persen serta menggunakan pengobatan ke UKBM sebesar 8,05 persen.

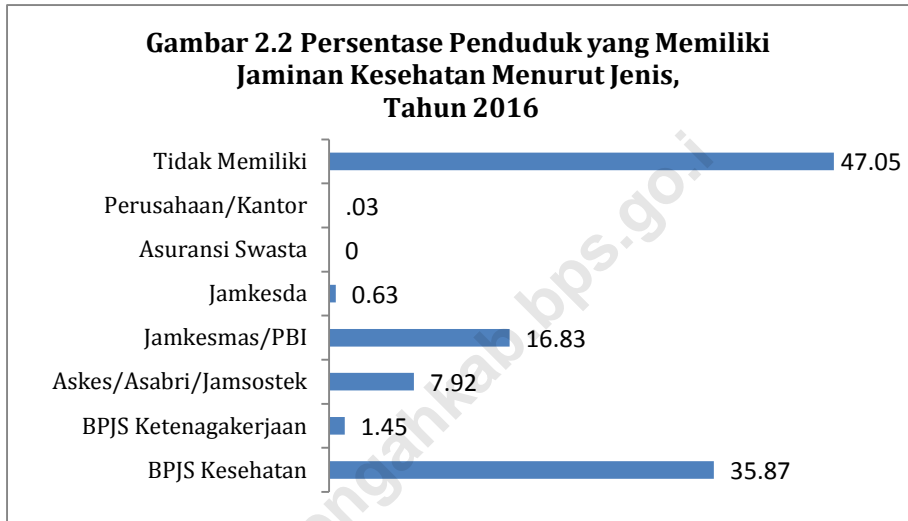
Tabel 2.2
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Pengobatan
Tahun 2013-2016

Tempat Pengobatan	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	10,64	10,94	13,77	21,34
Praktek Nakes	19,99	28,84	57,98	33,08
Puskesmas/Pustu	38,07	34,27	29,58	39,44
UKBM	34,10	31,75	4,52	8,05
Lainnya	3,03	1,77	1,17	9,87

Sumber: Susenas

Bagi penduduk yang melakukan rawat jalan maupun rawat inap sangatlah penting jika memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini sangat bermanfaat karena dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa penduduk Maluku Tengah pada Tahun 2016 yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yaitu sebesar 35,87 persen dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 47,05 persen.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, Tahun 2016



Sumber : Susenas

Kesehatan Ibu dan Anak

Indikasi tinggi rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah, dapat dicerminkan dengan tingkat kematian bayi diantaranya adalah antenatal yaitu pemeriksaan ibu hamil minimal empat kali pemeriksaan selama hamil. Selanjutnya pada saat proses persalinan, salah satu usaha untuk mengurangi tingkat kematian bayi adalah dengan pemberian fasilitas dalam proses kelahiran bayi tersebut, yaitu dengan penolong kelahiran oleh tenaga medis yang sudah terlatih dan terdidik.

Pada tahun 2016 terdapat 76,03 persen persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Hal ini menunjukkan terjadi sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana

penolong persalinan yang ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2015 sebesar 76,15 persen.

Tabel 2.3
Persentase Balita Menurut
Penolong Persalinan Pertama dan Terakhir
Tahun 2013-2016

Penolong Persalinan	Penolong Persalinan Terakhir			
	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tenaga Medis	59,32	67,15	76,15	76,03
2. Bukan Tenaga Medis	40,68	32,85	23,85	23,97
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas

Perhatian pada status kesehatan balita merupakan tindakan yang dini guna peningkatan kualitas fisik manusia. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi serta secara psikologis akan terjalin ikatan kasih sayang antara ibu dan anak.

Selain itu, kegiatan menyusui memberi dampak positif terhadap kesehatan ibu. Menyusui juga merupakan salah satu cara untuk menjarangkan kehamilan, memperpanjang menyusui dianggap sebagai cara yang lebih efektif dalam mengontrol fertilitas. Pada tahun 2016, persentase baduta umur 0-2 tahun yang pernah disusui selama kurang

dari atau sama dengan 11 bulan sebesar 71,90 persen dan yang disusui selama 12-17 bulan sebesar 12,53 persen.

Tabel 2.4
Persentase Baduta (Umur 0-2 Tahun) Yang Pernah Disusui
Menurut Lama Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Lama Disusui (Bulan)	2016		
	Lk	Pr	Total
(1)	(4)	(4)	(4)
≤ 11	76,05	65,60	71,90
12-17	12,40	12,73	12,53
18-24	11,55	21,67	15,57

Sumber: Susenas

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

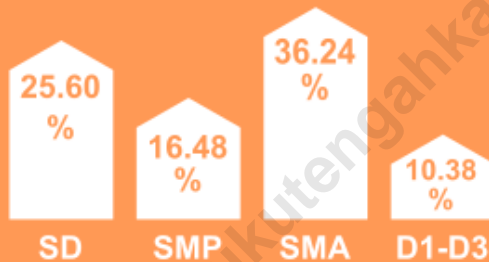
Pendidikan



Angka Melek Huruf Tahun 2016 sebesar

99.43%

Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf.

99.69% Laki-laki
99.16% Perempuan
99.43% Total

Angka Melek huruf laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.



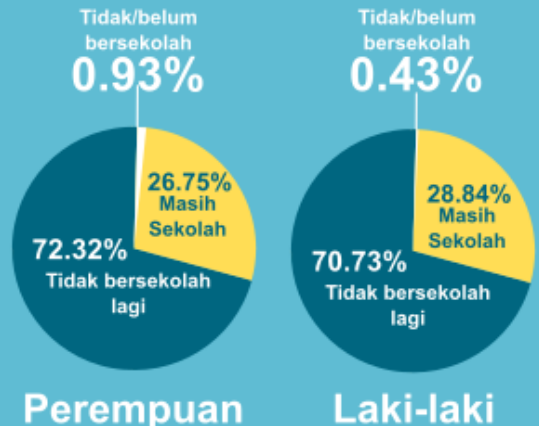
Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi

71.52%

Persentase total angka partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun

73.95%

Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut status pendidikan dan jenis kelamin.



<https://malukutengahkab.bps.go.id>

PENDIDIKAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Tujuan pembangunan dalam bidang pendidikan adalah tersedianya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program digulirkan pemerintah dalam bidang pendidikan, satu diantaranya adalah pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam rangka mendukung tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah antara lain pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi, bagi sebagian orang tua yang dianggap mampu akan merasa malu dan berdosa apabila tidak dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan kualitas pendidikanpun pada saat ini tidak luput dari perhatian para orang tua. Hal ini terbukti dengan semakin ketatnya persaingan untuk memasuki sekolah/lembaga pendidikan yang dianggapnya lebih bermutu dan berkualitas. Sampai saat ini tidak sedikit orang tua yang

bersusah payah untuk dapat menyekolahkan anaknya ke daerah perkotaan yang memiliki fasilitas pendidikan yang relatif banyak dan beragam.

Dengan semakin meningkatnya gairah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan diharapkan akan lebih mempermudah proses pembangunan dalam bidang pendidikan khususnya, dan bidang-bidang lain umumnya. Sementara itu dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan diperlukan data yang akurat untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam keadaan yang mendasari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan upaya peningkatan pembangunan pendidikan. Data yang dimaksudkan merupakan indikator pendidikan yang berfungsi memberikan indikasi atau petunjuk tentang berbagai macam dan jenis keadaan termaksud.

Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses

pembangunan. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin.

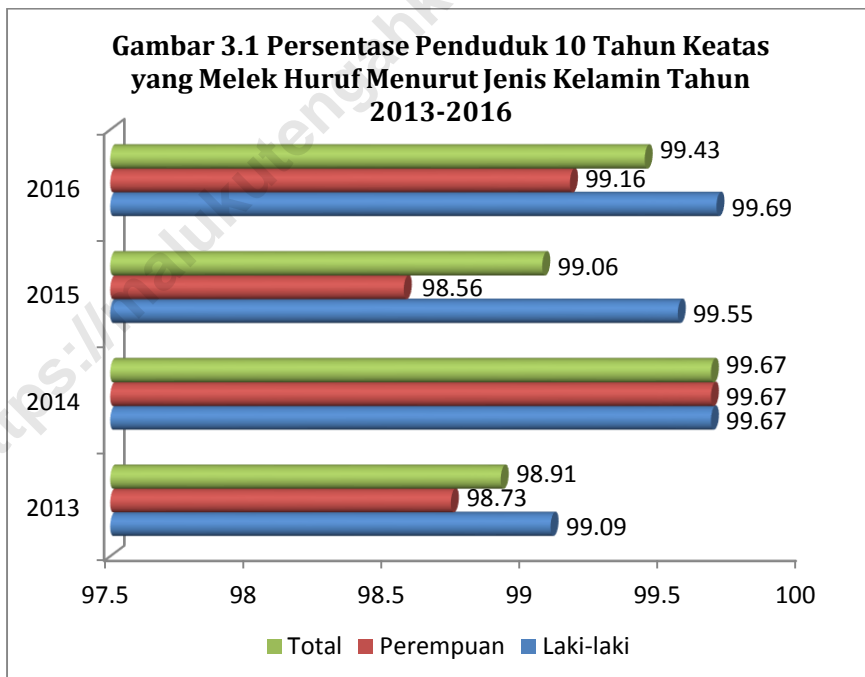
Yang dimaksud dengan melek huruf disini adalah kemampuan seseorang dalam membaca maupun menulis sehingga maksud yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dimengerti serta dimungkinkan terjadinya proses transformasi informasi dari aktifitas tersebut.

Seiring dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kian deras nya arus informasi yang disajikan melalui berbagai media massa, bagi penduduk yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis akan dapat lebih menikmati, sehingga proses pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup akan lebih mudah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis (buta huruf) akan selalu tertinggal, karena mereka tidak dapat mengakses informasi yang seharusnya diketahui. Bertolak dari kenyataan tersebut, pemerintah telah berupaya untuk menekan sekecil mungkin angka buta huruf, diantaranya dengan digelarnya program Pemberantasan Buta Huruf atau Program Keaksaraan Fungsional (KF) bagi penduduk yang tidak memungkinkan lagi mengikuti pendidikan formal.

Angka melek huruf di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2016 sebesar 99,43 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka



melek huruf laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini merefleksikan adanya ketimpangan yang cukup signifikan pada *out come* pendidikan dasar antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari aspek pendidikan dasar, laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan.



Sumber : Susenas

Untuk itu, secara umum program pemberantasan buta huruf harus terus dilakukan secara intensif dan menyeluruh sehingga dapat meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan secara khusus, pemberantasan buta huruf melalui program keaksaraan fungsional dapat menjadi program andalan dan dapat lebih fokus kepada perempuan sehingga dapat mengurangi ketimpangan angka melek huruf dengan laki-laki. Dengan meningkatkan angka melek huruf perempuan, maka secara tidak langsung dapat turut memberdayakan penduduk perempuan di Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam meraih peluang ekonomi maupun sosial.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk 15 Tahun keatas Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Tidak sekolah / belum tamat SD	11,29
S D	25,60
S M T P	16,48
S M T A	36,24
D 1 s/d S 3	10,38
S M T P +	63,10

Sumber : Susenas

Selain angka melek huruf, kualitas penduduk dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, akan tetapi tidak bisa menyatakan tentang hasil pendidikan yang telah dicapai orang dewasa. Sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat mencerminkan hasil pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu daerah secara spesifik mencerminkan taraf intelektualitas serta kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Sehingga tingkat pendidikan yang ditamatkan ini menjadi salah satu masukan dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

Penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2016 yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang SMP ke atas mencapai 63,10 persen. Sementara itu persentase penduduk yang sudah menamatkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi hanya sebesar 10,38 persen. Bahkan masih terdapat 11,29 persen penduduk 15 tahun keatas yang tidak sekolah atau belum tamat SD.

Partisipasi Pendidikan

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan dibidang pendidikan adalah dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Biasanya masalah yang sangat pokok berkaitan dengan Angka Partisipasi Sekolah adalah akses penduduk terhadap berbagai fasilitas

pendidikan yang tersedia, disamping kemampuan ekonomi yang merupakan faktor penentu utama.

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan. Pada tahun 2016, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status sekolah, terlihat bahwa sebesar 71,52 persen penduduk Kabupaten Maluku Tengah tidak bersekolah lagi, dimana jika dilihat menurut jenis kelamin 70,73 persen penduduk laki-laki tidak bersekolah lagi dan perempuan sebesar 72,32 persen.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas
Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2015-2016

Status Pendidikan	2015			2016		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,81	2,36	1,58	0,43	0,93	0,68
Masih Sekolah	27,08	26,87	26,98	28,84	26,75	27,80
Tidak Bersekolah Lagi	72,11	70,78	71,45	70,73	72,32	71,52

Sumber : Susenas

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan

Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,84 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,77 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 73,95 persen, dimana angka partisipasi sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Jenis Kelamin	Penduduk 7-12 Tahun	Penduduk 13-15 Tahun	Penduduk 16-18 Tahun
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Laki-laki	100,00	100,00	76,84
Perempuan	99,67	97,71	70,14
Total	99,84	98,77	73,95

Sumber : Susenas

Ketenagakerjaan



PENDUDUK

usia kerja 15 tahun ke atas
menurut karakteristik



Angkatan Bekerja Pengangguran
kerja

Jumlah Penduduk usia kerja di
Kabupaten Maluku Tengah mencapai
247.869 orang. Sedangkan 102.180
orang sisanya tergolong bukan
angkatan kerja.

Persentase Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2015



Tingkat Partisipasi, Pengangguran dan Kesempatan Kerja tahun 2015

Tingkat Kesempatan Kerja

87.25%

Tingkat Pengangguran Terbuka

12.75%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

58.78%

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dalam pembangunan ekonomi sektor ketenagakerjaan memberikan kontribusi yang sangat cukup besar khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan dimana banyak yang tergolong miskin, seringkali pemerintah berhasil dalam meningkatkan pendapatan mereka. Demikian pula dengan program peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas dari mereka yang pendapatan individunya masih rendah. Program pemerintah tersebut akan dapat membuka dan memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Penduduk merupakan sumber angkatan kerja, sehingga profil ketenagakerjaan merupakan gambaran kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan sendirinya akan mencerminkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja apabila tanpa dibarengi

kesempatan kerja yang memadai tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan sosial ekonomi. Untuk mengukur berbagai persoalan sosial ekonomi diperlukan indikator yang dapat mencerminkan kondisi sebenarnya yang sedang terjadi. Indikator tersebut diantaranya adalah indikator ketenagakerjaan.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja digolongkan sebagai angkatan kerja bila mereka mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, dan digolongkan sebagai bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pengadaan tenaga kerja yang merupakan bagian dari perwujudan kebijaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional harus mendorong pemerataan kesempatan kerja antar daerah dengan memperhatikan potensi angkatan kerja setempat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan banyak pengaruhnya terhadap upaya penyediaan lapangan pekerjaan, dimana apabila tidak terjadi keseimbangan yang harmonis pada akhirnya akan mengakibatkan ledakan pengangguran.

Tabel 4.1
Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Keatas
Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

Karakteristik	2015		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	124,199	123,670	247,869
Angkatan Kerja	95,847	49,842	145,689
Bekerja	85,298	41,821	127,119
Pengangguran	10,549	8,021	18,570
Bukan Angkatan Kerja	28,352	73,828	102,180
TPAK (%)	77.17	40.30	58.78
TPT (%)	11.01	16.09	12.75
TKK (%)	88.99	83.91	87.25

Sumber : Sakernas

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Maluku Tengah mencapai orang 247.869 , penduduk usia kerja laki-laki lebih besar dibanding perempuan dengan sex ratio 100,43 artinya setiap 100 orang usia kerja perempuan terdapat 100 orang penduduk usia kerja laki-laki juga. Sedangkan dari penduduk usia kerja itu yang tergolong angkatan kerja sebanyak 145.689 orang sedangkan 102.180 orang sisanya bukan angkatan kerja.

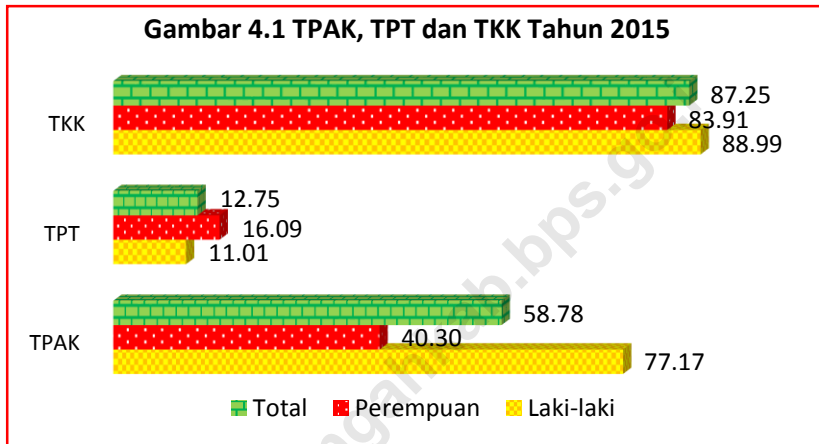
TPAK dan TKK

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPAK biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, budaya, demografi serta keadaan daerah.

TPAK di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 mencapai 58,78 persen. Ini berarti ada sekitar 58 persen penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menunjang kebutuhan hidup.

TPAK penduduk laki-laki lebih tinggi dari TPAK penduduk perempuan. TPAK penduduk laki-laki mencapai 77,17 persen sementara perempuan hanya sebesar 40,30 persen.

Selanjutnya kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena terpaksa menganggur, sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Pada tahun 2015, kesempatan kerja di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 87,25 persen, artinya terdapat sekitar 87 persen dari angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja di Kabupaten Maluku Tengah.



Sumber : Sakernas

Tingkatan Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 12,75 persen. Kondisi ini merupakan beban bagi pemerintah untuk menyediakan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pencari kerja di daerah ini. Selanjutnya pencari kerja laki-laki lebih rendah dari pencari kerja perempuan yaitu 16,09 persen TPT perempuan dan 11,01 persen TPT laki-laki.

Lapangan dan Status Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu alternatif untuk melihat potensi sector perekonomian, dimana sektor perekonomian yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja berarti merupakan sektor perekonomian andalan. Selain itu, dengan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun kita akan dapat mengetahui sektor perekonomian mana yang sedang tumbuh dan sektor perekonomian mana yang kontribusinya semakin menurun. Ketersediaan potensi alam dan potensi sumber daya manusia sangat mempengaruhi berkembangnya suatu sektor perekonomian. Selain itu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan perubahan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan pergeseran pada struktur lapangan usaha.

Dari hasil Sakernas 2015 diketahui bahwa komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Maluku Tengah di dominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hal tersebut sangat beralasan mengingat sektor pertanian mempunyai elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, selain itu untuk sektor pertanian tidak diperlukan sumber daya pendidikan yang relatif tinggi, sehingga potensi tenaga kerja yang belum tersalurkan di sektor lain dapat diserap di sektor pertanian.

Indikasi lain yang terjadi pada pola penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya kemajuan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan produktifitas tenaga kerja. Hal ini dimungkinkan karena mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa misalnya, cenderung memiliki tingkat produktifitas yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada sektor pertanian.

Sektor pertanian (termasuk kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 47,41 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 42,86 persen dan sektor industri sebesar 9,73 persen.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2015</i>		
	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L+P</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<i>A.Pertanian (Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan)</i>	56,26	29,36	47,41
<i>M.Industri (Pertamb, Ind.Pengolahan, Listrik, Gas & Air, Bangunan)</i>	11,85	5,40	9,73
<i>S Jasa-jasa (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Kemasyarakatan)</i>	31,89	65,24	42,86
<i>Jumlah</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Sumber : Sakernas

Sementara itu, indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Ada lima kategori mengenai status pekerjaan, yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar.

Pengelompokan status pekerjaan sangat berguna untuk menganalisa sifat pekerjaan pada sektor dan jenis pekerjaan tertentu. Pada umumnya, tenaga kerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar

lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerjaan yang relatif tradisional, atau yang sering disebut juga dengan sektor “informal” . Sedangkan pada usaha yang relatif moderen terdapat lebih banyak buruh atau karyawan, dan pengusaha dengan buruh tetap dengan kata lain sektor “formal”.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2015 status pekerjaannya dengan berusaha sendiri sebesar 35,58 persen, sebagai buruh/karyawan sebesar 31,84 persen.

Tabel 4.3
Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

Status Pekerjaan Utama	2015		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	35,10	36,55	35,58
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	16,93	7,34	13,77
Berusaha dibantu buruh tetap	2,95	0,00	1,98
Buruh/karyawan	33,62	28,23	31,84
Pekerja Bebas	0,77	0,00	0,52
Pekerja tak dibayar	1,65	0,40	1,24
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas

Masalah ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah lainnya termasuk kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas ekonomi. Semua ini secara intuitif tampaknya telah dipahami oleh kebanyakan pengambil kebijakan. Yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

Memetakan potensi dan kelemahan dari kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini merupakan cara yang harus dilakukan dalam menilai situasi dunia ketenagakerjaan. Dengan pemetaan tersebut, akan mempermudah melihat karakteristik ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah pemecahannya.



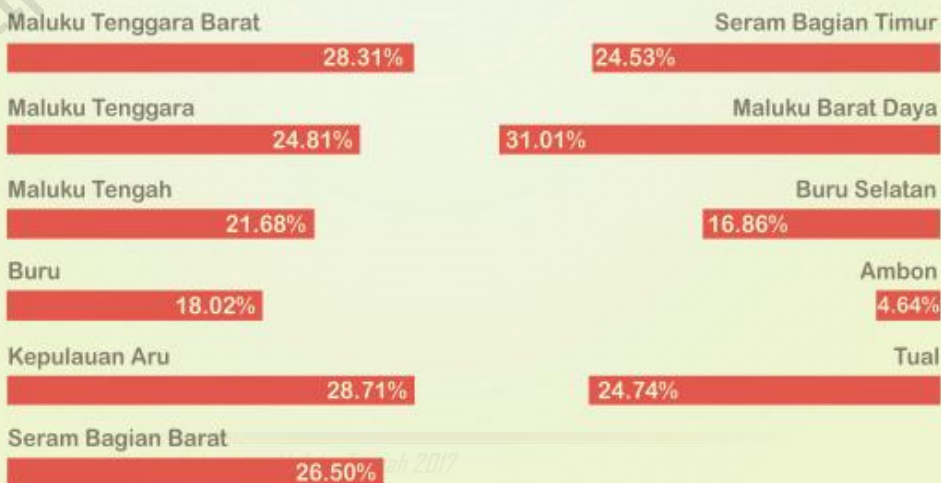
Taraf & Pola Konsumsi



Persentase pengeluaran makanan dan non makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016



Persentase penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota tahun 2016



<https://malukutengahkab.bps.go.id>

TARAF & POLA KONSUMSI

Salah satu indikator awal yang dapat mengungkapkan telah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dapat ditunjukkan dengan berkurangnya penduduk miskin dan bertambahnya tingkat pendapatan secara keseluruhan. Kondisi demikian secara tidak langsung dapat diamati melalui pola konsumsi rumah tangga/masyarakat tersebut.

Pola konsumsi rumah tangga secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengeluaran untuk konsumsi makanan dan kelompok pengeluaran bukan makanan. Tarik menarik antara dua kelompok tersebut mencerminkan tingkat kesejahtraannya. Semakin tinggi persentase pengeluaran konsumsi untuk kelompok bukan makanan terhadap total pengeluaran, semakin dianggap sejahtera masyarakat tersebut.

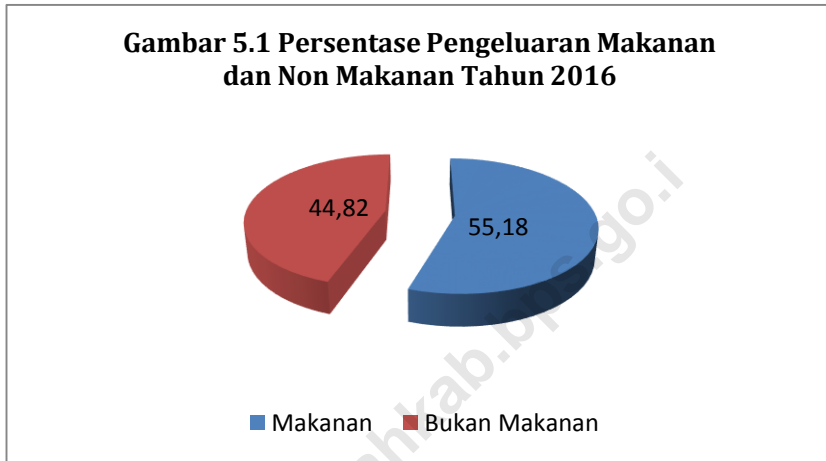
Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari

pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan umumnya tinggi.

Penurunan konsumsi non-makanan pada pola pengeluaran rumah tangga, diharapkan merupakan kondisi sesaat sebagai akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok. Dengan semakin intensifnya program-program perekonomian yang lebih menyentuh kepada lapisan bawah, diharapkan akan terjadi pemulihan kondisi perekonomian secara menyeluruh di Kabupaten Maluku Tengah. Peningkatan pendapatan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah diharapkan dapat terus dipacu untuk bersaing melawan lajunya biaya kebutuhan rumah tangga sekarang ini yang semakin tinggi.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2016



Sumber : Susenas

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan kesejahteraan.

Tabel 5.1
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan dan Persentase
Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015		2016	
	N	%	N	%
(1)	(1)	(1)	(2)	(3)
Makanan	405,977	54.48	446,601	55.18
Bukan Makanan	339,243	45.52	362,814	44.82
Total	745,220	100.00	809,415	100.00

Sumber : Susenas

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Maluku Tengah masih memiliki pola pengeluaran yang lebih besar pada jenis pengeluaran untuk makanan (55,18 persen) dibandingkan bukan makanan (44,82 persen). Dapat dikatakan permintaan akan pemenuhan akan kebutuhan makanan lebih besar dibandingkan bukan makanan. Artinya, pendapatan penduduk Kabupaten Maluku Tengah masih terkonsentrasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan untuk hidup sehingga kebutuhan bukan makanan dan untuk ditabung masih sangat rendah.

Pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2016 yang terbesar berada pada golongan pengeluaran diatas 1.000.000,- rupiah sebesar 30,13 persen, dan diikuti golongan pengeluaran 500.000 - 749.999

rupiah sebesar 26,01 persen dan golongan pengeluaran diatas 750.000 – 999.999 rupiah sebesar 21,11 persen. Dengan kata lain sudah cukup mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan kondisi yang sejahtera.

Tabel 5.2
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2013-2016

Golongan Pengeluaran	2013	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
< 100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 – 149.999	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000 – 199.999	0,89	0,26	0,00	0,00
200.000 – 299.999	9,21	4,16	3,08	2,38
300.000 – 499.999	33,07	24,32	20,01	20,37
500.000 – 749.999	33,24	33,07	34,35	26,01
750.000 – 999.999	14,34	17,80	19,15	21,11
1.000.000 +	9,26	20,39	23,41	30,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas

Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Maluku Tengah sebesar 22,10 persen atau sekitar 81.400 orang. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Maluku Tengah turun menjadi 21,68 persen atau sekitar 80.300 orang.

Tabel 5.3
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk
Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016

Kabupaten/ Kota	2015		2016	
	Jumlah (dalam ribuan)	%	Jumlah (dalam ribuan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	32.4	29,17	31.5	28,31
Maluku Tenggara	24.9	25,23	24.6	24,81
Maluku Tengah	81.4	22,10	80.3	21,68
Buru	23.4	18,47	23.5	18,02
Kepulauan Aru	26.1	28,64	26.5	28,71
Seram Bagian Barat	44.6	26,35	45	26,50
Seram Bagian Timur	27.4	25,37	26.9	24,53
Maluku Barat Daya	22.9	31,58	22.5	31,01
Buru Selatan	10.4	17,58	10.1	16,86
Ambon	17.9	4,38	19.64	4,64
Tual	16.7	24,90	17.12	24,74
Maluku	328.1	19,51	327.72	19,18

Sumber : Susenas

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

Perumahan

Rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik dari PLN sebanyak 92% dan sisanya 8% menggunakan penerangan selain listrik.



Persentase Rumah tangga yang dinding rumahnya menggunakan tembok sebanyak 70.79% diikuti dengan kayu sebanyak 23.41%

<https://malukutengahkab.bps.go.id>

PERUMAHAN

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, masalah pemukiman dan lingkungan sering muncul menjadi isu yang sangat krusial. Peranan pemerintah dalam menangani masalah pemukiman dan lingkungan sering mendapat hambatan seiring dengan semakin sulit serta tingginya ongkos yang harus dikeluarkan untuk dapat memiliki sebuah rumah. Bahkan bagi sebagian masyarakat berpendapatan rendah terutama untuk daerah perkotaan, dalam mendirikan rumah sudah tidak memperhatikan lagi dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Konsentrasi penduduk yang berlebihan dalam suatu wilayah biasanya dapat mengganggu keseimbangan alam. Rumah-rumah kecil yang saling berhimpitan dengan saluran limbah yang tidak teratur, menjadikan lingkungan tersebut menjadi kumuh dan tidak sehat. Produk limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga baik yang berbentuk limbah padat seperti sampah maupun limbah cair apabila tidak ditangani dengan benar dapat menjadikan sumber polusi. Dampak yang dapat dirasakan adalah menurunnya kualitas lingkungan dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas kesehatan pada lingkungan tersebut.

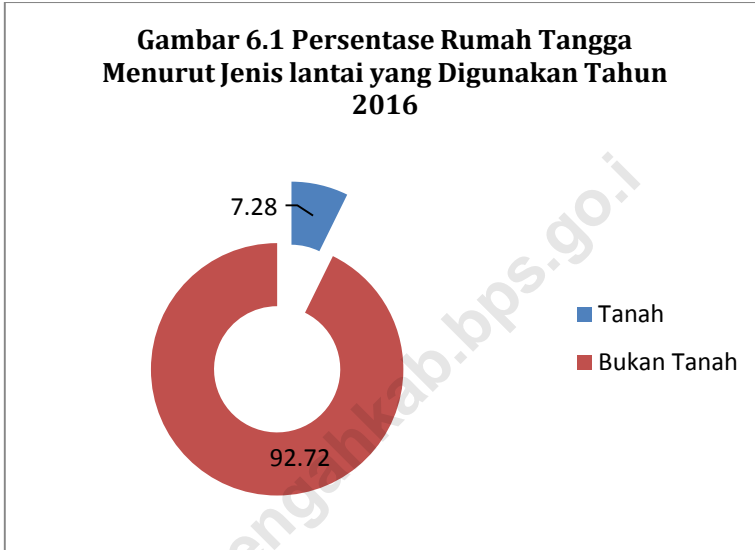
Kualitas Bangunan Rumah Tinggal

Betapapun sederhanya tingkat kebudayaan suatu masyarakat, namun masyarakat tersebut pasti mempunyai tempat untuk tinggal, baik yang bersifat tetap maupun sementara. Para tunawisma misalnya, pada dasarnya juga memiliki tempat tinggal, meskipun tempat tinggal tersebut tidak layak disebut rumah. Tingkat perekonomian masyarakat sangat menentukan kualitas pemukiman. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan terlihat dari bahan bangunan yang digunakan maupun kelengkapan rumah lainnya.

Fungsi rumah sebagai tempat bernaung/berteduh dan berkreasi semestinya memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, didefinisikan 'rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga'. Dalam kaitan ini pula kualitas perumahan dan lingkungan turut menentukan dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

Ada tujuh unsur yang merupakan syarat rumah dapat dikatakan lengkap. Ketujuh unsur tersebut yaitu: rumah tersebut permanen, memiliki fasilitas kamar khusus untuk tidur, memiliki dapur khusus untuk aktifitas memasak, memiliki kamar mandi, memiliki kakus untuk keperluan buang air besar, ada sarana air bersih yang layak untuk diminum dan memiliki sarana penerangan listrik.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis lantai yang Digunakan Tahun 2016



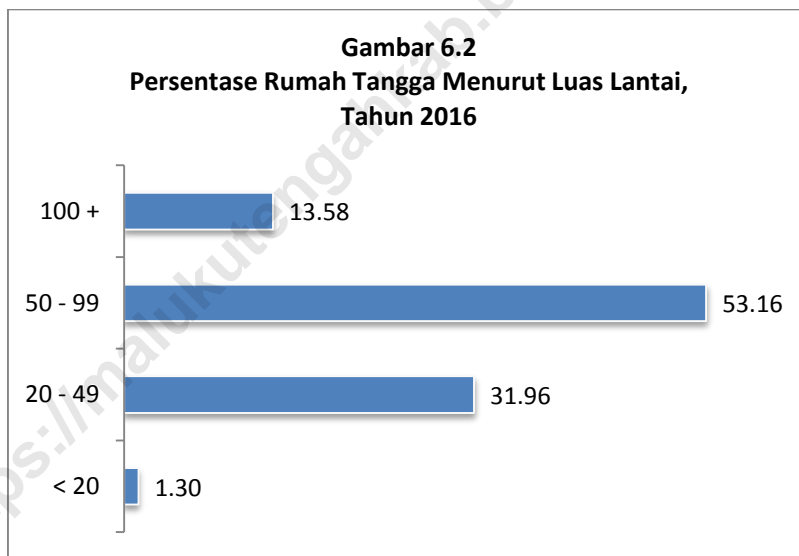
Sumber : Susenas

Gambar 6.1 menjelaskan jenis lantai rumah yang ditempati rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai tanah tergolong rendah yaitu sebesar 7,28 persen, namun hal ini berarti masih ada rumah tangga yang tinggal dalam rumah yang kurang sehat.

Sedangkan untuk luas lantai semakin luas lantai yang dihuni, semakin baik kenyamanan yang dapat dirasakan, karena dikatakan rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan.

Hal ini sesuai dengan kriteria rumah sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu rumah tinggal sehat adalah rumah dengan luas lantai per orang minimal 10 m². Dengan demikian bila rata-

7rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak lima orang maka luas lantai yang diperlukan minimal 50 m² untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2016 terdapat 33,26 persen rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah menghuni rumah yang luasnya kurang dari 50m² (Gambar 6.2).



Sumber : Susenas

Berdasarkan penggunaan jenis atap terluas, pada Tabel 6.1 rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah dengan penggunaan terbanyak dari seng sebesar 83,14 persen. Kemudian diikuti dengan penggunaan atap ijuk/rumbia/lainnya sebesar 10,28 persen. Hal ini dimungkinkan karena selain mudah diperoleh, harganya pun relatif bisa dijangkau.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat menurut penggunaan jenis dinding. Dari Gambar 6.3 terlihat bahwa jenis dinding yang paling banyak digunakan rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah adalah tembok sebesar 70,79 persen dan kayu sebesar 23,41 persen.

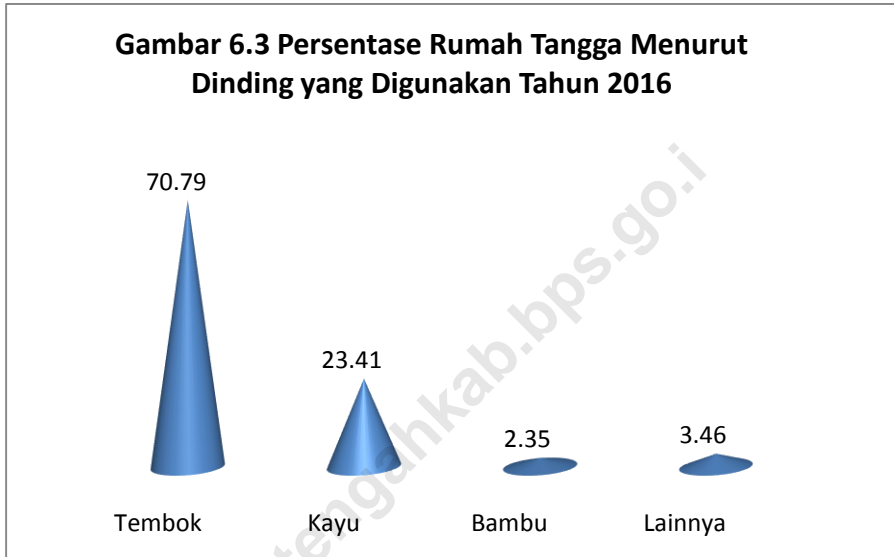
Tabel 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut
Jenis Atap yang Digunakan
Tahun 2013-2016

Jenis Atap	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beton/Genteng/Sirap/Asbes	7,85	5,10	3,67	6,58
Seng	79,54	83,92	88,36	83,14
Ijuk/Rumbia/lainnya	12,61	10,98	7,97	10,28

Sumber: Susenas

Namun yang perlu diperhatikan adalah penentuan jenis atap dan dinding rumah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun faktor budaya dan ketersediaan bahan baku juga turut berpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya dapat membantu penyediaan bahan baku untuk pembuatan rumah tinggal yang sehat bila faktor ketersediaan bahan baku sebagai faktor yang paling dominan.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding yang Digunakan Tahun 2016



Sumber : Susenas

Fasilitas Rumah Tinggal

Ketersediaan fasilitas pokok suatu rumah turut menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal seperti ketersediaan listrik, air minum dan jamban dengan tangki septik.

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber penerangan yang Digunakan
Tahun 2013-2016

Sumber Penerangan	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Listrik PLN	84,06	90,02	89,18	92,00
Listrik Non PLN	5,77	6,49	5,55	0
Bukan Listrik	10,17	3,48	5,27	8,00

Sumber: Susenas

Rumah yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan lebih baik. Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan penerangan petromak, pelita dan sumber penerangan lainnya. Selain dapat menerangi, listrik juga membuka peluang masuknya informasi, pengetahuan dan teknologi melalui perangkat elektronik yang secara langsung turut meningkatkan pengetahuan penduduk setempat. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 92 persen baik PLN maupun Non PLN.

Pemanfaatan air bersih oleh rumah tangga sebagai sumber air minum maupun untuk keperluan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi secara layak. Kualitas air yang digunakan erat dengan tingkat kesehatan. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal, biasanya yang menjadi perhatian utama adalah airnya. Dibanding dengan sumber air lainnya, air ledeng merupakan

sumber air yang paling baik kualitasnya. Air berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemarnya relatif cukup besar.

Tabel 6.3
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Air Minum yang Digunakan
Tahun 2016

Sumber Air Minum	2016
(1)	(2)
Air Isi Ulang	11,15
Ledeng	13,51
Pompa	3,17
Sumur Terlindung	24,97
Sumur Tidak Terlindung	1,33
Mata Air	40,71
Lainnya	5,17

Sumber: Susenas

Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum ledeng baru mencapai 13,51 persen. Kemungkinan penyebab sedikitnya rumah tangga pemakai ledeng selain karena faktor ekonomi juga disebabkan jangkauan pelayanan PDAM yang masih terbatas, sehingga sebagian besar rumah tangga mengambil air minum dari sumber mata air. Rumah tangga yang menggunakan air minum dari sumur terlindung sebesar 24,97 persen dan air minum dari mata air sebesar 40,71 persen. Dimana rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum terbanyak adalah fasilitas sendiri sebesar 46,71 persen.

Tabel 6.4
Persentase Rumah Tangga Menurut
Fasilitas Air Minum yang Digunakan
Tahun 2016

Fasilitas Air Minum (1)	2016 (2)
Sendiri	46,71
Bersama	16,34
Umum	29,43
Tidak Ada	7,52
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas

Fasilitas dalam rumah tangga selain sumber air minum dan listrik adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (bagi rumah tangga yang sumber air minumannya dari pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan.

Tabel 6.5
Persentase Rumah Tangga Menurut
Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tahun 2016

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2016
(1)	(2)
Sendiri	70,96
Bersama	7,72
Umum	3,33
Tidak Ada	17,99
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas

Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 70,96 persen, bahkan terdapat 17,99 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Tabel 6.6
Persentase Rumah Tangga Menurut
Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar
Tahun 2016

Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar	2016
(1)	(2)
Tangki	68,91
Lobang Tanah	5,67
Pantai/Tanah Terbuka	25,06
Sungai/Laut/Kolam/Sawah	0,36
Jumlah	100,00

Sumber: Susenas

Sedangkan tempat penampungan akhir tinja dengan tangki septik sebesar 68,91 persen. Selebihnya memanfaatkan pantai/laut/kebun/tanah kosong untuk tempat pembuangan akhir tinja. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena pembuangan tinja yang tidak baik dapat menyebarkan penyakit seperti diare.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Statistics of Maluku Tengah Regency

Jl. Raden Ajeng Kartini No 15, Masohi 97511

Telp: (0914) 21561, Fax: (0914) 22212

Homepage: malukutengahkab.bps.go.id E-mail: bps8103@bps.go.id